

Determinan *Fiscal Stress* (Tekanan Anggaran) pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Alfina Dwi Cahyani
Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya, Jl. Sriwijaya Negara, Palembang
fanicahyani310@gmail.com

Sandrayati
Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya, Jl. Sriwijaya Negara, Palembang
sandradewasaputra@gmail.com

Choiruddin
Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya, Jl. Sriwijaya Negara, Palembang
choiruddin@yahoo.com

Article's History:

Received 10 August 2024; Received in revised form 17 August 2024; Accepted 10 September 2024; Published 1 October 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested Citation:

Cahyani, A. D., Sandrayati., & Choiruddin. (2024). Determinan *Fiscal Stress* (Tekanan Anggaran) pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (5). 2940-2950. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i5.2988>

ABSTRAK:

Tujuan kajian berikut adalah menyelidiki hubungan Pemasukan Asli Daerah, Pendapatan Daerah Lainnya, dan Belanja Pegawai terhadap Tekanan Anggaran pada pengelola lokal Provinsi Sumatera Selatan. 15 kab/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018-2022 dijadikan sampel kajian ini. Kajian ini menerapkan teknik analisis regresi berganda dengan menggunakan Eviews 12 sebagai alat uji hipotesis dengan pendekatan metode terbaik. Bersifat kuantitatif dan menggunakan data sekunder berupa LHP LKPD yang dapat diunduh melalui www.e-ppid.bpk.go.id. Temuan studi ini menyatakan bahwa penerimaan asli daerah memiliki dampak negatif signifikan terhadap tekanan fiskal, biaya pegawai/tenaga kerja mempunyai dampak positif signifikan terhadap tekanan fiskal, dan pendapatan daerah lainnya tidak mempunyai pengaruh terhadap tekanan fiskal. Ketiganya memberikan dampak signifikan kepada tekanan fiskal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah; Pendapatan Daerah Lainnya; Belanja Pegawai; *Fiscal Stress*.

PENDAHULUAN

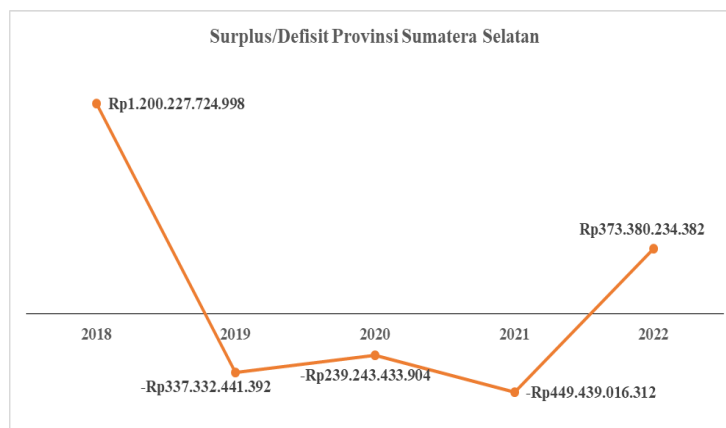
Wabah pandemi Covid-19 telah membawa dampak buruk terhadap berbagai industri. Pada awalnya hanya berdampak pada industri kesehatan namun dengan singkat menyebabkan krisis ekonomi secara global. Dampak dari pandemi telah membawa perekonomian Indonesia masuk ke jurang resesi, hal ini membatasi mobilitas perekonomian yang berdampak pada lemahnya roda perekonomian dan berakhir pada penurunan pendapatan negara. Pada tahun 2020, timbulnya tekanan pada anggaran belanja yang cukup besar yang mengakibatkan peningkatan akan kebutuhan darurat untuk mengatasi bencana kesehatan dan memperkuat pengamanan sosial di lingkup masyarakat. Pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan belanja darurat, pendapatan yang menurun, pengurangan aktivitas ekonomi, peningkatan pengeluaran untuk jaring pengaman sosial, serta penurunan investasi publik. Apabila pemerintah mengeluarkan lebih besar anggaran daripada menerima pemasukan maka dapat menimbulkan potensi tekanan anggaran (*fiscal stress*).

Kondisi dimana terjadi kesenjangan antara fasilitas pelayanan yang dibutuhkan publik dengan yang diberikan pemerintah berdasarkan sumber daya yang ada disebut *fiscal stress* (Septira & Prawira, 2019). *Fiscal stress* mengalami peningkatan disebabkan oleh tuntutan dalam mendorong kemandirian daerah dimana hal ini dicerminkan melalui potensi asli daerahnya dalam membiayai pengeluaran yang dibutuhkan (Arnett, 2012). Kenyataannya adalah sumber daya keuangan dan kapasitas di setiap lokasi berbeda-beda. Meskipun peningkatan kemandirian lokal ialah hal yang esensial, namun ada daerah tertentu yang masih belum mampu mewujudkan potensinya secara maksimal. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu cara untuk mengurangi terjadinya kondisi

fiscal stress (Widyahastuti, 2021). Dalam rangka penerapan desentralisasi keuangan belanja, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyokong strategi Indonesia dalam melaksanakan otonomi daerah. Hal ini menyerahkan kekuasaan kepada pengelola lokal untuk menyelidiki kemungkinan aliran pamarukan bagi daerahlokalnya dan mendistribusikannya secara bebas guna menetapkan prioritas pembangunan daerahnya berdasarkan kebutuhan tersebut.

Daerah harus mengkaji potensi yang dimilikinya agar dapat menerapkan konsep otonomi daerah, yang mengharuskan pengelola lokal untuk tidak terlalu menggantungkan pendanaan perimbangan dari pemerintah pusat. Salah satu bentuk usaha pemerintah dalam mengoptimalkan keuangan daerahnya dengan cara optimalisasi pendapatan asli daerah yaitu melakukan peningkatan penerimaan pajak dan retribusi (Lhutfi et al., 2020). Mengingat tingginya tuntutan masyarakat karena banyaknya perubahan pembiayaan, jika pendapatan daerah tidak mampu menutupi belanja tersebut maka akan mengakibatkan timbulnya kondisi *fiscal stress* (Muda, 2012). Selain itu, pemeirntah juga dapat melakukan peningkatan terhadap sumber-sumber penerimaan lainnya seperti lainnya pemasukan daerah. Hal ini akan memberikan peluang bagi daerah untuk memperoleh dana dari sumber selain potensi asli lokal dan pendapatan transfer dengan meningkatkan pemasukan lokal lainnya. Harapannya adalah ketika pendapatan daerah lainnya meningkat, pemerintah daerah akan mampu membiayai pelayanan publik dan pembangunan secara mandiri, sehingga akan mengurangi tekanan fiskal (Puspitorini & Lenggogeni, 2022).

Untuk meningkatkan standar penyelenggaraan desentralisasi fiskal, pemerintah menerbitkan UU No.1 Tahun 2022 tentang HKPD dengan tujuan memberi sokongan kepada pengelola lokal dalamhal melakukan pengelolaan penerimaan daerah dan mendongkrak kualitas belanja daerah khususnya belanja pegawai. Pemerintah menetapkan batasan pengeluaran untuk tenaga kerja maksimal 30% dari APBD. Jika biaya tenaga kerja tinggi dan tidak sesuai dengan kapasitas fiskal daerah, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya defisit anggaran atau memangkas dana yang dialokasikan untuk sektor lain. Hal ini berdampak atas meningkatnya tekanan fiskal (Putri dkk., 2023).



Gambar 1. Surplus/Defisit Provinsi Sumatera Selatan
Sumber: LKPD Provinsi Sumatera Selatan 2018-2022 (diolah peneliti 2024)

Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu daerah yang mengalami defisit anggaran selama periode 2019-2021. Pada masa ini pemerintah dihadapkan dengan meningkatnya pengeluaran daerah untuk pengadaan peralatan media dan perawatan kesehatan bagi masyarakat, sementara aktivitas ekonomi mengalami penurunan akibat pembatasan aktivitas sehingga pendapatan pajak mengalami penurunan. Dalam mengurangi tingkat *fiscal stress*, Provinsi Sumatera Selatan perlu mengoptimalkan setiap sumber pendapatan daerah dan melakukan pengelolaan belanja daerah yang baik. Selama periode 2018-2022, pendapatan asli daerah yang diterima Provinsi Sumatera Selatan selalu lebih kecil daripada dana perimbangan, hal tersebut memperlihatkan besarnya ketergantungan daerah akan bantuan pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat meningkatkan lain-lain pendapatan daerah dalam membantu membiayai pengeluaran daerah. Hal ini dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerahnya dalam membiayai pembangunan daerah dan melaksanakan pelayanan publik. Peningkatan kedua sumber pendapatan tersebut diharapkan mampu membiayai pengeluaran daerah. Terlebih dalam membiayai belanja pegawai yang selama 5 tahun terakhir selalu lebih tinggi daripada belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran daerah dialokasikan ke belanja pegawai.

Didasari oleh permasalahan yang telah dibahas tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian bagaimana belanja pegawai, pendapatan daerah lainnya, dan pendapatan asli daerah berpengaruh kepada

tekanan fiskal secara parsial dan simultan. Sasaran observasi ini ialah demi mendapat informasi terkait factor pengaruh secara parsial dan simultan terhadap tekanan fiskal yang berasal dari pemasukan asli lokal, pendapatan lokal lainnya, dan belanja pegawai/tenaga kerja. Studi ini mencakup variabel yang jarang dianalisis dan pembaruan tahun 2018–2022.

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan Pemerintah Daerah

Fungsi dari adanya laporan finansial pemerintah daerah yaitu menyampaikan informasi mengenai finansial daerahnya untuk para stakeholder, informasi ini dipergunakan sebagai dasar dalam membuat penilaian ekonomi, politik, dan sosial (Mahmudi, 2016). Laporan yang menginformasikan mengenai realisasi keuangan daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA menyajikan data mengenai perbandingan antara realisasi dan anggaran dari penerimaan, beban, perimbangan, surplus/defisit, dan pembiayaan dalam 1 periode finansial. Ketika terjadi diferensiasi antara penerimaan dan pengeluaran akan dicatat sebagai surplus/defisit. Apabila pemasukan melebihi pengeluaran maka terjadilah surplus, sebaliknya ketika pemasukan lebih kecil dari pengeluaran maka terjadilah defisit. Defisit anggaran merupakan indikasi tekanan finansial yang diakibatkan oleh tekanan pengeluaran yang melebihi pendapatan.

Kapabilitas pemerintah dalam memberlakukan desentralisasi fiskal dapat digunakan untuk mengukur tingkat pengurangan tekanan fiskal (Widyahastuti, 2021). Dengan melaksanakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah maka akan lebih meratakan pembangunan dan menuntut daerah untuk meningkatkan kemandirian daerahnya sesuai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini memberikan manfaat kepada daerah otonom bila dikombinasikan dengan sumber daya keuangan yang mencukupi. Dalam Badrudin (2012:19) desentralisasi fiskal dinilai dengan melihat rasio antar komponen pendapatan daerah dengan pengeluaran daerah dalam APBD. Penerimaan terdiri atas penghasilan asli, penerimaan transfer, dan pendapatan daerah lainnya sementara belanja terdiri atas pengeluaran rutin dan pembangunan.

Fiscal Stress (Tekanan Anggaran)

Kondisi dimana terjadi kesenjangan antara fasilitas pelayanan yang dibutuhkan publik dengan yang diberikan pemerintah berdasarkan sumber daya yang ada disebut *fiscal stress* (Septira & Prawira, 2019). Ketika belanja daerah meningkat dan tidak diimbangi secara memadai oleh sumber pendapatan daerah merupakan tanda terjadinya tekanan anggaran. Kebutuhan akan meningkatnya kemandirian melalui meningkatnya pendapatan sendiri untuk memenuhi berbagai kebutuhan/pengeluaran daerah dapat membuat tekanan anggaran semakin tinggi (Rianti, 2020). Unsur penting bagi efektifitas pelaksanaan otonomi daerah pada masa otonomi adalah ketersediaan potensi sumber daya daerah dan tingkat kesiapan daerah.

Penyebab terjadinya tekanan anggaran ialah karena keterbatasan dalam penerimaan anggaran guna mendanai pelaksanaan pembangunan peningkatan pendapatan daerah (Junita & Abdullah (2016:474). Tingginya *fiscal stress* dapat memengaruhi bagaimana kinerja keuangan pemerintah dalam hal pengelolaan dan pengalokasian pengeluaran, hal ini mendorong pemerintah daerah untuk membuat berbagai terobosan dalam penyediaan dana bagi penyelenggaraan pelayanan publik dan operasional pemerintahan. Menurut Arnett (2012:62), ada lima cara untuk mengukur tekanan fiskal di daerah antara lain rasio keuangan, sisa taksiran akhir tahun yang tidak disisihkan, penurunan kinerja pendapatan pemerintah daerah, peningkatan pajak terhadap trend belanja, dan defisit anggaran.

Pendapatan Asli Daerah

Tertera dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), pemasukan asli daerah merupakan segala pemasukan yang berasal dari pungutan daerah (pajak dan retribusi), hasil pengelolaan kekayaan lokal, serta pendapatan lokal lainnya sesuai ketentuan perundangan.

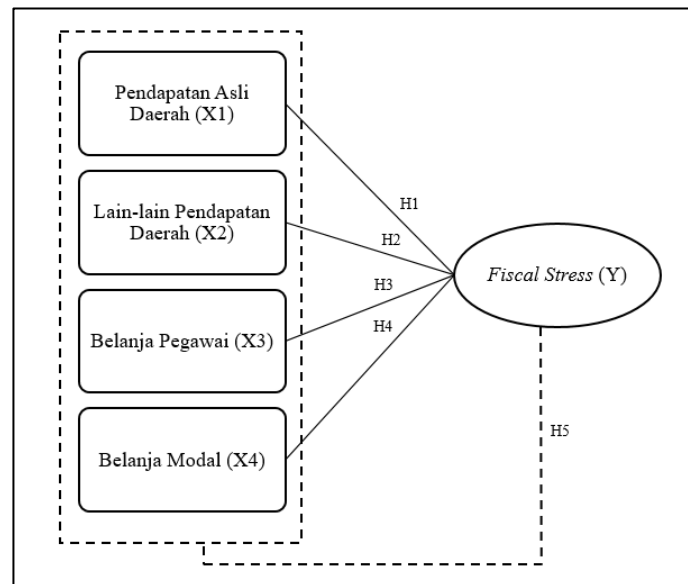
Pendapatan Daerah Lainnya

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, segala pemasukan lokal selain transfer dan pemasukan asli daerah dianggap sebagai penerimaan daerah lainnya. Dana hibah, dana mendesak, dan pendapatan lain sesuai ketentuan perundangan termasuk dalam penghasilan ini.

Belanja Pegawai

Biaya pegawai/tenaga kerja merupakan kompensasi berupa uang maupun barang yang patut diberikan kepada karyawan pemerintah lokal dan luar negeri, baik itu pejabat negara, PNS, dan pegawai pemerintah yang belum menyandang status PNS dan/atau non-PNS dalam jangka waktu tertentu sebagai imbalan/honor atas pekerjaan dan jasa yang diselesaikan selama menunjang fungsi satuan organisasi pemerintahan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran).

Kerangka Penelitian



Gambar 2. Kerangka Penelitian
Sumber: Diolah Penulis (2024)

Hipotesis

Dampak Pendapatan Asli Daerah terhadap Tekanan Fiskal

Tingkat tekanan anggaran akan berfluktuasi sebagai respon terhadap perubahan (kenaikan/penurunan) komponen pendapatan daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan lokal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi asli daerah. Penerimaan lokal yang tinggi dapat dimanfaatkan untuk mendanai biaya daerahnya. Ketika suatu daerah dapat membiayai belanja daerahnya sendiri, maka kemungkinan besar daerah tersebut akan mengalami tekanan fiskal yang rendah jika pendapatan asli daerahnya meningkat (Iciah et al., 2021).

H1 : Pendapatan Asli Daerah berdampak terhadap Tekanan Fiskal.

Dampak Pendapatan Daerah Lainnya terhadap Tekanan Fiskal

Agar tidak hanya bergantung pada satu sumber pendanaan, pemerintah daerah dapat mengambil manfaat dari peningkatan pendapatan daerah lainnya. Peningkatan pendapatan daerah lainnya diperkirakan akan memungkinkan pemerintah daerah untuk mendanai layanan publik dan pembangunan daerah secara independen sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya tekanan anggaran (Puspitorini & Lenggogeni, 2022).

H2 : Pendapatan Daerah Lainnya berdampak terhadap Tekanan Fiskal.

Dampak Biaya Pegawai terhadap Tekanan Fiskal

Struktur belanja daerah berdampak pada tekanan fiskal selain pendapatan daerah (Putri dkk., 2023). Tekanan anggaran (*fiscal stress*) terjadi disebabkan oleh penerimaan atau pendapatan yang tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan belanja (Suryani et al, 2023). Pemerintah daerah akan menghadapi defisit anggaran jika pengeluaran pegawai yang besar tidak diimbangi dengan kemampuan keuangannya. Defisit yang berkepanjangan akan menyebabkan terjadinya tekanan fiskal (Putri dkk, 2023).

H3 : Belanja Pegawai berdampak terhadap Tekanan Fiskal.

Pengaruh Pemasukan Asli Daerah, Pendapatan Daerah Lainnya, beserta Belanja Pegawai terhadap Tekanan Fiskal

Hipotesis yang diuraikan diatas serta ringkasan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerimaan asli daerah, pendapatan daerah lainnya, dan belanja pegawai secara simultan dapat berdampak pada tingkat tekanan fiskal. Untuk mencegah tekanan anggaran, keterkaitan ketiga komponen ini bersinergi untuk menciptakan keseimbangan antara anggaran pendapatan dan belanja. Penyebab terjadinya *fiscal stress* disebabkan oleh tidak terjadinya keseimbangan antara penerimaan daerah dengan pengeluaran daerah.

H4 : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Daerah Lainnya, dan Biaya Tenaga Kerja secara bersamaan berdampak terhadap Tekanan Fiskal.

METODELOGI

Penelitian berikut menggunakan metode hubungan sebab akibat dan bersifat kuantitatif. Sugiyono (2019), mengartikan penelitian kuantitatif sebagai penelitian yang mengamati populasi atau sampel tertentu, menggunakan alat peneltian untuk mengumpulkan data dan menganalisis data numerik untuk mngevaluasi hipotesis yang telah terbentuk sebelumnya, serta melihat hubungan sebab akibat antara variabel terikat yang terkena dampak dan variabel bebas yang memberikan pengaruh.

Penelitian ini memanfaatkan LHP atas LKPD pelaksana local Prov. Sumsel periode 2018-2022 yang diakses melalui laman *website* E-PPID BPK RI yaitu <https://e-ppid.bpk.go.id/>. Dalam penelitian ini penerimaan asli daerah, lain-lain pendapatan daerah, dan belanja pegawai sebagai variabel bebas sementara tekanan anggaran sebagai variabel terikat. Kab/kota di Provinsi Sumatera Selatan merupakan populasi yang diteliti. Pengambilan sampel dengan metode *non-probability sampling* dengan teknik *proposive sampling* sehingga didapat 15 kab/kota digunakan sebagai sampel penelitian ini. Sampel yang akan diolah berjumlah 75 sampel karena digunakan data 5 tahun anggaran yaitu 2018-2022.

Tabel 1. Daftar Populasi

Daftar Populasi			
No	Kab/Kota	No	Kab/Kota
1	Kabupaten Banyuasin	10	Kabupaten Ogan Komering Ulu
2	Kabupaten Empat Lawang	11	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
3	Kabupaten Lahat	12	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
4	Kabupaten Muara Enim	13	Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir
5	Kabupaten Musi Banyuasin	14	Kota Lubuk Linggau
6	Kabupaten Musi Rawas	15	Kota Pagar Alam
7	Kabupaten Musi Rawas Utara	16	Kota Palembang
8	Kabupaten Ogan Ilir	17	Kota Prabumulih
9	Kabupaten Ogan Komering Ilir		

Sumber: sumselprov.go.id (2024)

Data yang di analisis adalah data sekunder yang berupa LRA yang diolah menggunakan *software Econometric Views* versi 12. Analisis yang dilakukan dalam studi ini antara lain uji regresi data panel dengan pemilihan model terbaik, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji parsial, dan uji simultan. Model persamaan regresi data panel:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{ PAD} + \beta_2 \text{ LPD} + \beta_3 \text{ BP} + e$$

Keterangan:

Y = *Fiscal Stress* (Tekanan Anggaran)
 α = Konstanta/tetapan
 β = *Slope/coefficient regression*
 PAD = Pendapatan Asli Daerah
 LPD = Lainnya Pendapatan Daerah
 BP = Belanja Pegawai
 e = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Hasil Pemilihan Model

Model Fixed Effect (FEM) terpilih sebanyak dua kali melalui *Chow test* dan *Hausman test* berdasarkan pengujian pemilihan model terbaik untuk menyelidiki efek dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Daerah Lainnya, dan Belanja Pegawai terhadap Tekanan Fiskal pengelola anggaran lokal daerah di Prov. Sumsel.

Uji Asumsi Klasik

Analisis *regression* dengan asumsi *Ordinary Least Square* (OLS) yang berupaya menentukan nilai variabel tertentu harus lulus uji asumsi klasik secara statistik. Agar BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) atau regresi linear berganda dapat menghasilkan model yang tidak bias (Ghozali dan Ratmono, 2017). Namun karena kajian ini menggunakan model regresi data panel sehingga tidak semua pengujian asumsi menggunakan OLS. *Fixed Effect Model* (FEM) terpilih sebagai model terbaik pada saat pengujian, maka hanya uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas yang dilakukan sebagai uji asumsi klasik.

Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1,713862	344,7845	NA
X1	8,21E-06	1,036958	1,012639
X2	0,002570	325,2597	1,001696
X3	7,08E-05	18,1852	1,011589

Gambar 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Sumber: Output Eviews 12 (2024)

Hasil uji multikolinearitas menghasilkan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dari variabel bebas Penerimaan Asli Daerah sebesar 1,012639, variabel Lainnya Pendapatan Daerah sebesar 1,001696, dan variabel Belanja Pegawai sebesar 1,011589. Setiap variabel memiliki nilai $VIF \geq 10$ sehingga dapat dikatakan bahwa dalam model regresi tidak mempunyai permasalahan multikolinearitas antar variabel independen.

Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	1,895949	Prob. F(3,71)	0,1381
Obs*R-squared	5,562661	Prob. Chi-Square(3)	0,1349
Scaled explained SS	8,997081	Prob. Chi-Square(3)	0,2093

Gambar 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber: Output Eviews 12 (2024)

Hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji *Glejser* menghasilkan nilai *Prob. Chi-Square* pada *Obs*R-Square* $> 0,05$ yaitu $0,1349 > 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi tidak menjumpai masalah heterokedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Model terpilih melalui pendekatan regresi terbaik dalam pengujian model ialah *Fixed Effect Model* (FEM). Berikut hasil regresi berganda dengan model FEM:

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26,00658	1,001768	25,96067	0,0000
X1	-0,003708	0,001679	-2,207974	0,0313
X2	0,047072	0,038342	1,227695	0,2246
X3	0,022831	0,008879	2,571212	0,0128
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-Squared.	0,717258	Mean dependent var.	27,92537	
Adjusted R-Squared.	0,632932	S.D. dependent var.	0,649386	
S.E. of regression.	0,393438	Akaike info criterion.	1,177776	
Sum squared resid.	8,823221	Schwarz criterion.	1,733973	
Log likelihood.	-26,16660	Hannan-Quinn criter.	1,399859	
F-statistic.	8,505737	Durbin-Watson stat.	1,119373	
Prob(F-statistic).	0,000000			

Gambar 5. Hasil Regresi FEM
Sumber: Output Eviews 12 (2024)

Berdasarkan hasil regresi berganda dengan metode FEM maka persamaan regresinya:

$$Y = 26,00658 - 0,003708X_1 + 0,047072X_2 + 0,022831X_3 + e$$

- Nilai konstanta (α) sebesar 26,00658 mengartikan bahwa variabel Tekanan Anggaran (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 26,00658 atau 2600,7% apabila variabel Pemasukan Asli Daerah (X1), Lainnya Pendapatan Daerah (X2), beserta Biaya Pegawai (X3) bernilai 0, sementara sisanya variabel Tekanan Anggaran (Y) akan ditentukan oleh variabel lain.
- Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) memiliki koefisien regresi (β_1) bernilai negatif senilai 0,003708. Hal ini menandakan apabila dengan asumsi variabel bebas lainnya bernilai tetap, maka variabel tekanan fiskal akan mendapti penurunan 0,003708 atau 0,37%, jika variabel penerimaan potensi asli daerah mengalami kenaikan sebesar 1%.
- Variabel Lain-lain Pendapatan Daerah (X2) memiliki koefisien regresi (β_2) bernilai positif senilai 0,047072. Hal ini menandakan bahwa dengan asumsi variabel bebas lainnya bernilai tetap, maka variabel tekanan fiskal akan mendapti kenaikan 0,047072 atau 4,71%, jika variabel lain-lain pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar 1%.
- Variabel Belanja Pegawai (X3) memiliki koefisien regresi (β_3) bernilai positif senilai 0,022831. Hal ini menandakan bahwa dengan asumsi variabel bebas lainnya bernilai tetap, maka variabel tekanan fiskal akan mendapti kenaikan 0,022831 atau 2,28%, jika variabel lain-lain pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar 1%.

Uji Hipotesis Uji Koefisien Determinasi

R-Squared.	0,717258
Adjusted R-Squared.	0,632932
S.E. of regression.	0,393438
Sum squared resid.	8,823221
Log likelihood.	-26,16660
F-statistic.	8,505737
Prob(F-statistic).	0,000000

Gambar 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Sumber: Output Eviews 12 (2024)

Berdasarkan gambar 6, nilai *Adjusted R-Squared* senilai 0,632932 atau 63,2932%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel terikat yaitu Tekanan Fiskal dapat diterangkan oleh variabel bebas yang terdiri dari

Penerimaan Asli Daerah, Lainnya Pemasukan Daerah, dan Belanja Pegawai sebesar 63,2932%, sementara sisanya 36,7068% diterangkan oleh faktor yang tidak dieksplorasi dalam penelitian ini.

Uji Parsial (Uji-t)

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26,00658	1,001768	25,96067	0,0000
X1	-0,003708	0,001679	-2,207974	0,0313
X2	0,047072	0,038342	1,227695	0,2246
X3	0,022831	0,008879	2,571212	0,0128

Gambar 7. Hasil Uji Parsial
Sumber: Output Eviews 12 (2024)

Nilai t-tabel sebesar 1,995. Berdasarkan gambar 7, didapat hasil uji parsial sebagai berikut:

- Variabel PAD (X1) memiliki nilai t-hitung negatif senilai 2,207974 dengan probabilitas 0,0313 yang bermaksud adanya dampak negatif signifikan dari komponen pendapatan asli daerah kepada tekanan fiskal.
- Variabel Pendapatan Daerah Lainnya (X2) memiliki nilai t-hitung positif senilai 1,227695 dengan probabilitas 0,2246 yang berarti komponen pendapatan daerah lainnya tidak memiliki pengaruh bagi tekanan fiskal.
- Variabel Biaya Pegawai (X3) memiliki nilai t-hitung positif senilai 2,571212 dengan probabilitas 0,0128 yang berarti variabel belanja pegawai mempunyai pengaruh positif signifikan pada tekanan fiskal.

Uji Simultan (Uji-F)

R-Squared.	0,717258
Adjusted R-Squared.	0,632932
S.E. of regression.	0,393438
Sum squared resid.	8,823221
Log likelihood.	-26,16660
F-statistic.	8,505737
Prob(F-statistic).	0,000000

Gambar 8. Hasil Uji Simultan
Sumber: Output Eviews 12 (2024)

Nilai F-tabel sebesar 2,746. Uji simultan menghasilkan nilai F-stat. sebesar 8,505737 dengan tingkat prob. 0,000000 artinya variabel bebas PAD, pendapatan daerah lainnya, dan biaya tenaga kerja secara bersama akan berdampak signifikan kepada tekanan fiskal.

PEMBAHASAN

Dampak Pemasukan Asli Daerah terhadap Tekanan Fiskal

Berdasarkan gambar 7 diperoleh $2,207974 > 1,995$ dengan probabilitas $0,313 < 0,05$ artinya adanya pengaruh negatif signifikan dari PAD terhadap tekanan fiskal. Hasil ini sepakat dengan penelitian (Lhutfi et al., 2020) dan (Suryani et al., 2023) yang memaparkan jika adanya dampak negatif dari PAD kepada tekanan fiskal. Hal ini mengartikan bahwa tekanan anggaran akan menurun seiring dengan peningkatan pendapatan daerah, begitu pula sebaliknya. Semakin besar proporsi pendapatan yang diperoleh dari kapasitas yang dimiliki daerah dibandingkan sumber pendapatan transfer, maka daerah tersebut akan semakin mandiri dalam mendanai belanja daerahnya. Pendapatan asli daerah dapat menjadi proksi derajat kemandiriannya. Tingginya tingkat otonomi daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut bisa menggunakan secara maksimal potensi alam yang dimilikinya.

Pertumbuhan pendapatan asli daerah yang sehat akan mengurangi tingkat tekanan finansial. Pendapatan asli daerah yang mengalami peningkatan akan memberikan sumber dana lebih besar bagi pemerintah daerah untuk menekan ketergantungan akan penerimaan transfer. Dalam hal kab/kota di Prov. Sumsel tahun 2018-2022, meskipun PAD memiliki dampak negatif terhadap tekanan fiskal namun rasio pertumbuhannya menunjukkan

bahwa pertumbuhan PAD belum memadai/mencapai target yang diinginkan. Hal ini mengartikan bahwa upaya dalam meningkatkan PAD yang belum optimal atau mengalami kendala yang menghambat peningkatan yang signifikan contohnya pada tahun 2020 saat terjadi bencana global wabah Covid-19 yang membuat pertumbuhan PAD mencapai angka -4,62%. Maka dalam hal ini pemerintah daerah perlu mengevaluasi strategi dan kebijakan yang ada untuk meningkatkan PAD secara lebih efektif sehingga dapat menekan tingkat tekanan fiskal yang lebih baik. Pemerintah daerah dapat melibatkan cara intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan asli daerah, penganebaran sumber pendapatan, serta memperbaiki manajemen finansial lokal.

Dampak Lainnya Pemasukan Daerah terhadap Tekanan Fiskal

Berdasarkan gambar 7 diperoleh $1,227695 < 1,995$ dengan probabilitas $0,2246 > 0,05$ artinya komponen lain-lain pendapatan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap tekanan fiskal. Hasil ini bertentangan dengan penelitian (Puspitorini & Lenggogeni, 2022) yang menemukan bahwa pendapatan daerah lainnya yang sah memiliki dampak negatif terhadap tingkat tekanan fiskal dimana semakin tinggi lain-lain pendapatan daerah dapat mengurangi tingkat *fiscal stress*, begitu juga sebaliknya.

Pada dasarnya dengan meningkatkan pendapatan daerah lainnya, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer pemerintah pusat sehingga dapat secara mandiri membiayai pelayanan publik dan pembangunan daerah. Hal ini dapat mengurangi tingkat tekanan fiskal di suatu daerah (Puspitorini & Lenggogeni, 2022). Hal ini tidak berlaku dengan kab/kota di Provinsi Sumatera Selatan dimana fluktuasi lain-lain pendapatan daerah tidak memengaruhi tingkat *fiscal stress*. Hal ini disebabkan karena pendapatan daerah lainnya hanya memberikan porsi yang sangat kecil terhadap total pendapatan daerah. sehingga tidak memberikan dampak besar pada keseluruhan anggaran (terlebih pada saat tingkat *fiscal stress* tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus memastikan efisiensi setiap sumber pendapatan yang diterima termasuk lain-lain pendapatan daerah meskipun dampaknya tidak cukup besar terhadap *fiscal stress*, ini akan membantu dalam menjaga keseimbangan anggaran dan memastikan bahwa semua potensi pendapatan dimanfaatkan secara optimal dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pusat.

Dampak Belanja Tenaga Kerja terhadap Tekanan Fiskal

Berdasarkan gambar 7 diperoleh $2,571212 > 1,995$ dengan probabilitas $0,0128 < 0,05$ artinya komponen belanja pegawai mempunyai dampak positif signifikan pada tekanan fiskal. Hasil ini sejalan dengan temuan (Putri dkk., 2023) dan (Suryani et al., 2023) yang mengatakan bahwa belanja pegawai berdampak positif terhadap tekanan fiskal.

Tuntutan kemandirian daerah yang lebih besar dengan cara meningkatkan penerimaan asli daerah guna menunjang berbagai belanja yang ada akan menyebabkan tekanan fiskal semakin buruk. (Rianti, 2020). Dampak positif dari belanja pegawai dapat berfungsi sebagai ukuran tingkat tekanan fiskal daerah, sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk mengontrol bagaimana belanja pegawai dialokasikan sesuai dengan pendapatan yang ada untuk mengurangi tingkat tekanan fiskal yang berlebihan (Putri dkk., 2023). Pengaruh positif ini menandakan jika semakin besar belanja pegawai maka semakin besar juga tingkat tekanan fiskal kab/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hal tersebut diakibatkan oleh mahalnya biaya gaji pegawai, tunjangan, dan pengeluaran lain terkait pegawai sehingga mengakibatkan alokasi belanja pegawai pada belanja daerah relatif tinggi, atau berarti kontribusi belanja pegawai terhadap pengeluaran daerah yang cukup besar. Belanja pegawai yang tinggi akan mengakibatkan defisit anggaran atau menurunnya alokasi pendanaan pada sektor lain, sehingga akan semakin menekan anggaran jika tidak diimbangi dengan kemampuan fiskal daerahnya. Pentingnya pengelolaan belanja pegawai yang baik sesuai potensi daerah yang dimiliki sehingga pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan perencanaan yang lebih baik dalam pengalokasian anggaran, memastikan bahwa belanja pegawai dialokasikan berdasarkan prioritas dan kebutuhan daerahnya.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Daerah Lainnya, dan Biaya Pegawai kepada Tekanan Fiskal

Berdasarkan gambar 8 diperoleh $8,505737 < 2,746$ dengan nilai probabilitas $0,000000 < 0,05$, yang artinya variabel bebas PAD, pendapatan daerah lainnya, dan biaya tenaga kerja secara bersama memiliki dampak signifikan kepada tekanan fiskal. Pemerintah harus meningkatkan kemandirian daerahnya dalam rangka mengoptimalkan potensi yang ada di daerahnya (PAD), serta meningkatkan sumber pendapatan selain PAD dan dana perimbangan yaitu pendapatan daerah lainnya. Hal ini akan mengurangi ketergantungan wilayah tersebut pada bantuan pendapatan transfer. Hal ini sesuai teori (Iciah et al., 2021) yang memaparkan bahwa setiap daerah

harus meningkatkan potensi yang dimiliki daerahnya agar lebih mandiri. Daerah dengan aliran pendapatan yang cukup biasanya mempunyai tingkat tekanan fiskal yang lebih rendah. Selain itu, pemerintah harus melakukan perencanaan dan memastikan bahwa pengeluaran daerah tidak melebihi kemampuan fiskal daerahnya. Hal ini mendukung teori (Putri, dkk. 2023) yang menyampaikan bahwa semakin besar tingkat belanja pegawai maka semakin besar juga tingkat tekanan fiskal. Maka dapat disimpulkan bahwa pengoptimalan dan peningkatan PAD dan pendapatan daerah lainnya, serta perencanaan dan pengendalian pembiayaan dari belanja pegawai yang akurat dapat membantu mengurangi tingkat tekanan fiskal.

KESIMPULAN

1. Pemasukan Asli Daerah (X1) mempunyai dampak negatif signifikan terhadap tekanan fiskal pada pelaksana lokal Prov. Sumsel, artinya peningkatan PAD akan mengurangi tingkat *fiscal stress*, begitu pula sebaliknya.
2. Pendapatan Daerah Lainnya (X2) tidak memiliki pengaruh terhadap tekanan fiskal pada pelaksana lokal Prov. Sumsel, hal ini disebabkan karena kontribusi pendapatan daerah lainnya yang relatif kecil terhadap total pendapatan daerah.
3. Belanja Pegawai (X3) mempunyai dampak positif signifikan terhadap tekanan fiskal pada pelaksana lokal Prov. Sumsel artinya seandainya belanja tenaga kerja mengalami peningkatan, maka tekanan fiskal juga mengalami peningkatan.
4. Secara bersamaan ketiga faktor tersebut mempunyai dampak signifikan terhadap tekanan finansial mengartikan bahwa pengalokasian biaya tenaga kerja yang tepat serta peningkatan penerimaan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya dapat memengaruhi tingkat tekanan fiskal pada pelaksana lokal Prov. Sumsel.

REFERENSI

- Arnett, S. B. 2012. *Fiscal Stress in the U.S. States: An Analysis of Measures and Responses*. Disertasi. Department of Publik Management and Policy. Georgia State University.
- Badan Pemeriksaan Keuangan. (2018). LHP atas LKPD. Indonesia.
- _____. (2019). LHP atas LKPD. Indonesia.
- _____. (2020). LHP atas LKPD. Indonesia.
- _____. (2021). LHP atas LKPD. Indonesia.
- _____. (2022). LHP atas LKPD. Indonesia.
- Badrudin, R. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. 2017. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan EvIEWS 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Icih, Kurniawan, A., & Fadillah, R. 2021. The Influence of Local Revenue, Capital Expenditure, Economic Growth of GDP, General Allocation Funds, Fiscal Decentralization and Diversification of Regional Income on *Fiscal Stress*. *Journal of Accounting for Sustainable*. 03(32): 34-53.
- Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan. 2023, Maret 1. Diperoleh dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan: <https://sumselprov.go.id/page/content/sekilas-sumatera-selatan>.
- Lhutfi, I., et al. 2020. Do the Growth of Original Local Government Revenues and the Growth of Capital Expenditure Affect *Fiscal Stress*. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Venture*. 23(1).
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muda, I. 2012. Variabel yang Memengaruhi *Fiscal Stress* pada Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*. 4(1), 27-46.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Anggaran.
- Puspitorini, D., & Lenggogeni. 2020. Variables Affecting *Fiscal Stress* in Regency/City of Aceh Province 2016-2019 Period. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*. 5(2), 16045-16057
- Putri, H. A., et al. 2023. Determinan *Fiscal Stress* pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera. *Jurnal Riset*

- Terapan Akuntansi. 7(2), 2019-219.
- Rianti, M. 2020. Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Pertumbuhan Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress* (Tekanan Anggaran) pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. Skripsi. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Septira, F., & Prawira, I. F. A. 2019. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi *Fiscal Stress*. Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan. 7(1), 57.
- Sugiyono. 2019. Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Suryani, S. S., & Windijarto. 2023. Determinan of *Fiscal Stress* on Local Government Finances in East Java. Journal of Social Research. 2(4).
- Widyahastuti, A. 2021. Pengaruh Kemandirian Keuangan, Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Politeknik Negeri Sriwijaya.